

PENGARUH *BURMA CENTRUM NEDERLAND (BCN)* DALAM PEMBATALAN KONTRAK *INDUSTRIËLE HANDELS COMBINTIE (IHC) CALAND* DI MYANMAR

Rachma Eka Yulianti

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-mail : rachma.eka14@gmail.com

Penelitian ini berawal dari pertanyaan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Burma Centrum Nederland (BCN) dalam pembatalan kontrak Industriële Handels Combinatie atau Industrial Trade Combine (IHC) Caland di Myanmar. Kontrak bisnis tersebut menjadi masalah ketika IHC Caland menandatangani kontrak ketika permasalahan hak asasi manusia karena rezim militer junta yang berkuasa di Myanmar. Semenjak pertama kali IHC Caland mengumumkan kerjasama yang dilakukan, terdapat berbagai protes yang diterima. Utamanya berasal dari organisasi-organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia, buruh dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori trans advocacy networks atau TANs yang berfokus pada perusahaan. Peneliti mengajukan sebuah hipotesis bahwa Pengaruh Burma Centrum Nederland (BCN) dalam menghentikan kontrak IHC Caland di Myanmar dapat dilihat melalui dua strategi yang digunakan, yakni BCN melakukan leverage politics terhadap head quarter IHC Caland di Belanda dan membangun kohesivitas jaringan dengan serikat buruh, FoE atau Friends of Earth dan partai politik untuk menekan pemegang saham IHC Caland di Belanda. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam membuktikan hipotesis di penelitian ini, yakni leverage politics dan kohesivitas jaringan yang dibangun oleh BCN. Melalui penelitian ini dibuktikan bahwa upaya yang dilakukan BCN dalam membatalkan kontrak IHC Caland di Myanmar adalah dengan menggunakan strategi leverage politics dan kohesivitas jaringan guna menekan pemegang saham di head quarter IHC Caland di Scheiham, Belanda.

Kata-kata kunci: BCN, Myanmar, IHC Caland, *leverage politics*, kohesivitas jaringan, Strategi, TAN

Pendahuluan

Pada tanggal 13 Juli 1998, *Industriële Handels Combinatie* (IHC) Caland mengumumkan bahwa melalui anak perusahaannya, SBM Production Contractors Inc yang berada di Swiss melakukan kontrak kerjasama dengan anak perusahaan British Premier Oil, Premier Petroleum Myanmar Ltd selama 15 tahun. Pengumuman tersebut dimuat dalam koran Belanda, *Financieel Dagblad* pada tanggal 14 Juli 1998. Kontrak kerjasama tersebut mengenai kerjasama dalam pengembangan dari blok gas Yetagun sepanjang 215 kilometer di pesisir Myanmar. Anak perusahaan IHC Caland bertanggung jawab atas alat-alat atau logistik dari pengembangan blok tersebut. Akibat dari diumumkankannya kerjasama tersebut, IHC Caland menerima protes dari berbagai kalangan, utamanya dari komunitas atau lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada permasalahan di Myanmar. Salah satu organisasi yang berfokus terhadap kasus tersebut adalah BCN atau *Myanmar Centrum Nederland*. Kontrak kerjasama tersebut menjadi masalah ketika situasi di Myanmar masih kurang memungkinkan untuk menerima investasi asing. Selain itu, IHC Caland melakukan ekspansi bisnis di Myanmar ketika pada waktu itu sebagian besar *multinational corporation* (MNC) yang

berada di Myanmar memutuskan untuk pergi dari Myanmar. Hal tersebut dikarenakan kondisi negara Myanmar yang dalam implementasinya masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, perhatian dunia internasional pada waktu itu terhadap Myanmar cenderung tinggi. Faktor lain yang menjadi masalah adalah di era kontemporer saat ini, keterlibatan aktor bukan negara semakin meningkat yang ditunjukkan dengan keterlibatan *non governmental organization* atau NGO, MNC dan aktor bukan negara yang lain. Keterlibatan MNC dalam hubungan internasional berkorelasi dengan kondisi perekonomian suatu negara bahkan internasional. Selain itu, lingkup MNC yang sudah *trans border* juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keterlibatan antara MNC dalam hubungan internasional. Munculnya MNC juga membutuhkan keterlibatan pemerintahan, baik negara asal maupun negara yang dituju dalam hal pengawasan dan peraturan yang berlaku dalam operasionalisasi perusahaan (Ratner, 2001).

Myanmar merupakan salah satu negara yang terletak dikawasan Asia Tenggara dan berbatasan dengan India, Bangladesh, Tiongkok, Thailand dan Laos. Myanmar memiliki penduduk lebih dari 52 juta penduduk yang dibagi dalam lebih dari 135 kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Myanmar memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki sejarah yang panjang. Myanmar mendapatkan kemerdekaannya dari Britania Raya pada tahun 1948. Sehingga, Myanmar mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi parlementer barat (Zarni, 2000). Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win mengambil alih pemerintahan dan pada tahun 1974, negara berubah menjadi sosialis dengan satu partai yakni *Myanmar Socialist Programme party* atau BSPP. Pada masa awal berkuasa, Ne Win “mengisolasi” Myanmar dari dunia luar. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat Myanmar dilarang untuk berpergian keluar negeri dan pengajuan visa ke Myanmar juga ditolak dalam periode tertentu. Ne Win berkuasa selama 26 tahun. Akibat dari berkuasanya Ne Win adalah sistem ekonomi yang terpusat dan militer yang berkuasa secara penuh dengan institusi-institusi sejenisnya (Spit, 1995). Pemberontakan dan demonstrasi atas tuntutan reformasi masyarakat menjadi demokrasi tidak dapat dihindarkan. Guna menekan kelompok-kelompok pemberontak tersebut, militer menggunakan aksi kekerasan (Ferrara, 2003). Setelah Ne Win lengser dari kekuasaan, pemerintahan melakukan sebuah perubahan yang signifikan dengan mengadopsi sebuah nama baru, yakni *State Law and Order Restoration Council* atau SLORC. Selain itu, adanya sebuah gerakan liberasi demokrasi yakni *National League for Democracy* (NLD) yang dipimpin oleh Au San Suu Kyi, seorang anak perempuan dari salah satu pahlawan kemerdekaan melawan Britania Raya.

Pada tahun 1989, terdapat peristiwa penting yang mana terjadi perubahan nama dari Myanmar menjadi Myanmar. Selain itu, pemerintahan yang baru menjadi lebih terbuka dengan dunia internasional yang ditandai dengan membuka adanya investasi asing guna deregulasi perekonomian dan menarik kurs asing. Meskipun pada waktu itu Myanmar menjadi lebih terbuka dengan dunia internasional, tekanan yang diberikan kepada masyarakat tidak berkurang dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti menjadi tahanan serta pemaksaan kepada masyarakat, masih terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dilatarbelakangi dengan peran militer yang mendominasi, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan serta kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim militer dalam berbagai aspek dengan sasaran etnis minoritas (Zarni, 2000). Pada tahun 1990, SLORC melakukan pemilihan umum dengan beberapa partai politik terlibat didalamnya. Hasil dari pemilihan umum tersebut adalah NLD keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebanyak 62%. Hal tersebut berarti bahwa NLD berhak mendapatkan 80% kursi parlementer. Namun, hasil dari pemilihan umum tersebut tidak diakui oleh SLORC. Mulai dari awal muncul sebagai pemimpin NLD, Au San Suu Kyi telah merasakan sebagai tahanan dan juga menerima penghargaan Nobel dalam bidang perdamaian karena tindakan

anti-kekerasan yang dilakukan. Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.

Berdasarkan paragraf diatas, dapat diketahui bahwa Myanmar memiliki suatu kondisi dimana situasi hak asasi manusia-nya mengalami pelanggaran dan keterbatasan masyarakat atas negara. Situasi tersebut juga didukung dengan sistem pemerintahan parlementer yang semakin mengukuhkan negara dalam kekuasaan absolut. Keadaan yang demikian memberikan dampak dalam berbagai aspek, utamanya sosial dan ekonomi. Perekonomian Myanmar pada waktu itu sangat parah yang ditunjang dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan dari seluruh total masyarakat Myanmar, satu persen diantaranya merupakan golongan elit, konglomerat dan militer Myanmar (Holliday, 2005). Kekuasaan rezim militer junta berlaku pada seluruh aspek di Myanmar, tidak terkecuali dengan aspek ekonominya. Salah satu bukti peranan rezim junta dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diatur, dimana pembagian dari anggaran tersebut satu per tiga dari jumlah pendapatan yang diterima, dialokasikan dalam bidang militer.

Investasi asing juga menjadi salah satu bidang yang tidak luput dari pengaruh rezim militer junta pada waktu itu. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya hukum investasi asing yang diberlakukan. Sikap protes yang diberikan kepada MNCs yang melakukan bisnis di Myanmar mengalami kecaman dikarenakan adanya keterkaitan atas hukum investasi asing yang berlaku. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tindakan . *The Confederation of British Industry* atau CBI mengkritik pemerintahan Inggris guna menarik seluruh perusahaan Inggris dari Myanmar karena masalah hak asasi manusia yang diakibatkan oleh Junta. CBI berargumen bahwa karena tidak adanya sanksi yang tegas terkait masalah hak asasi manusia di Myanmar oleh *United Nations* (UN) dan Inggris, maka dapat diserahkan kepada para MNC dimana akan dilakukan bisnis. Hal tersebut dikarenakan bisnis yang dilakukan akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, investasi asing secara tidak langsung juga semakin menguatkan posisi kediktatoran yang berkuasa. Au San Suu Kyi, melihat bahwa sanksi internasional sebagai hal yang tepat dalam melawan sistem ekonomi Junta. Sehingga, adanya investasi asing di negara yang cenderung dikuasai oleh kediktatoran hanya akan memberikan keuntungan pribadi bagi para jenderal, sedangkan masyarakat menjadi lebih miskin. Jadi, kesenjangan sosial menjadi lebih tinggi karena adanya investasi asing. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan guna mencegah bertumbuhnya kelas menengah di Myanmar. Tindakan preventif tersebut bertujuan menekan tindakan demokratis bagi negara (Sen & Gutter, 2001).

Keberadaan investasi asing yang semakin memperkuat rezim militer di Myanmar dibuktikan dengan adanya ketidakbebasan dalam melakukan bisnis. Contoh nyatanya adalah MNC yang melakukan bisnis di Myanmar tidak memiliki kebebasan dalam menentukan mitra bisnis. Selain itu, pemerintah juga tidak membebaskan Myanmar dalam memilih karyawan pula. Sebaliknya, perusahaan harus menerima karyawan yang telah disarankan oleh militer junta. Dasar dari tindakan pemerintah Junta adalah tata cara perekrutan pekerja yang diumumkan pada tahun 1992, bahwa perusahaan baik swasta maupun bukan yang memperkerjakan lima orang atau lebih harus melapor kepada Dinas Tenaga Kerja yang kemudian diberikan daftar kandidat yang memenuhi persyaratan dalam formulir (Sen & Gutter, 2001). Seluruh undang-undang mengenai penanaman modal dan perusahaan asing di Myanmar berasal dari undang-undang ketenagakerjaan pada tahun 1872. Berdasarkan SLORC undang-undang mengenai penanaman modal asing no 10/88 yang disahkan pada tanggal 30 November 1998 sebagai dasar untuk membuka investasi asing di Myanmar. Sedangkan pada Bab 4 Pasal 5 mengatakan bahwa investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni investasi asing

yang 100% modalnya berasal dari asing dan usaha patungan antara warga negara asing dan warga negara Myanmar. Pasal 6 dari bab yang sama memperjelas bentuk terakhir bahwa setidaknya memiliki 35% dari total modal yang dimiliki. Selain itu, dalam praktek bisnis hukum yang berlaku adalah negara Myanmar. Sehingga dengan kata lain bahwa militer juga memiliki kontrol atas mitra asing. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pasal 8 yang semakin memperkuat pemerintahan militer Myanmar bahwa pemerintah dapat membentuk komite atau badan yang diperlukan terkait penanaman modal asing. Pasal 14 menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas dari komite atau badan tersebut dapat memberikan izin bisnis dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud terbagi menjadi empat bagian, antara lain pertama perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus, kedua terjadinya pelanggaran kontrak dari salah satu pihak, ketiga *force majeure* atau keadaan diluar batas manusia seperti bencana alam dan keempat adalah ketidakmampuan dalam memenuhi target awal perusahaan. Pada pasal 32 pemerintah berhak mengubah aturan yang berlaku apabila diperlukan (Sen & Gutter, 2001).

Penjelasan dalam beberapa paragraf diatas, dapat diketahui bahwa situasi Myanmar yang kurang kondusif dalam menerima investasi asing. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa investasi asing yang dilakukan justru akan semakin membantu legitimasi rezim militer Junta di Myanmar. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa MNCs yang ingin membuka bisnis di Myanmar harus patuh terhadap pemerintahan yang berlaku serta tidak menyentil terkait masalah demokrasi dan Au San Suu Kyi. Selain itu, rezim militer junta juga campur tangan terkait masalah penentuan harga, upah dan nilai tukar. Hal tersebut diperparah dengan kredibilitas dalam administrasi dan hukum Myanmar yang kurang. Selain itu, kondisi Myanmar yang semakin tidak kondusif dalam melakukan investasi adalah korupsi yang masih merajalela dan hukum pajak di Myanmar yang tidak menentu, tergantung dengan berapa banyak inspektur pajak meminta. Berdasarkan kondisi Myanmar yang demikian, maka sebagian besar MNC pergi meninggalkan Myanmar pada tahun 1990-an awal hingga pertengahan. Pepsi merupakan salah satu MNC yang pergi meninggalkan Myanmar dengan menjual saham gabungan dengan perusahaan lokal pada tahun 1996. Setahun setelahnya, pepsi keluar sepenuhnya dari Myanmar berdasarkan penilaian perusahaan terkait Myanmar yang juga didukung dengan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat, sebagai negara asal perusahaan, yang melarang perusahaan Amerika untuk melakukan bisnis di Myanmar. Selain itu, adanya aksi pemboikotan dari konsumen di Amerika. MNC lain juga keluar dari Myanmar antara lain Levi Strauss, Amoco, Shell, Compaq, Apple, Kodak, Heinaken, Texaco, ARCO, Toyota, Hewlett-Packard, Phillips, Carlsberg dan Motorola. Meskipun banyak perusahaan yang keluar dari Myanmar, juga terdapat perusahaan yang masuk di Myanmar, seperti IHC Caland (Sen & Gutter, 2001).

IHC Caland adalah sebuah perusahaan multinasional dari Belanda yang bergerak dalam bidang teknologi maritim. Kegiatan dari perusahaan ini adalah mulai dari dengan mendesain, konstruksi hingga menyediakan kapal *custom-built*, *dredger* minyak serta instalasi pengeboran, loading, platform dan pembongkaran sistem untuk tanker dan proyek lepas pantai. Sebagian besar mitra IHC Caland adalah perusahaan besar dalam industri minyak, pengerukan dan pertambangan. IHC Caland merupakan pemimpin pasar dalam bidang ini. IHC Caland mampu mengeksekusi proyek dengan tantangan yang tinggi dari permukaan laut ke dasar laut di lingkungan maritim paling menantang sekalipun. Hal ini dikarenakan IHC Caland merupakan pemasok yang handal dari peralatan terinovatif dan efisien dalam bidang kapal dan jasa untuk industri *offshore*, *dredging* dan *wet mining market*. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa IHC Caland bukanlah pemain baru dalam bidang ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IHC Caland telah mendalami pembuatan kapal sejak pertengahan abad ke-XVII. Sehingga, pengetahuan, keahlian Teknik dan

manufaktur peralatan kapal yang terintegrasi berkinerja tinggi serta disokong dengan pelayanan berkelanjutan menjadi nilai khusus bagi IHC Caland di bidang industri *offshore*. Hal ini juga didukung dengan lebih dari 3.000 pekerja yang dimiliki oleh IHC Caland dan tersebar di 39 negara di dunia serta kondisi sumber daya manusia yang mumpuni dengan 44,3% pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. IHC Caland menjadi pemimpin dalam bidang digeluti juga didukung dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Dana lebih dari €20.000.000 dikucurkan untuk melakukan riset dan perkembangan. Selain itu, lebih dari 500.000 jam dihabiskan untuk melakukan inovasi serta sebanyak 15 proyek kolaborasi dengan beberapa universitas dan Lembaga pengetahuan dan penelitian. Sebesar 40 mahasiswa/i juga turut dilibatkan dalam proyek inovasi ini (royalihc.com, 2019).

Perusahaan induk IHC Caland telah terdaftar dalam indeks AEX (*Amsterdam Exchange Index*) sejak tahun 1999. Memasuki tahun 1990-an akhir, salah satu negara yang menjadi tempat kegiatan bisnis IHC Caland adalah Myanmar (den Hond & de Bakker, 2012). Myanmar merupakan negara yang memiliki sumber daya yang melimpah, salah satunya adalah gas alam. Ladang gas tersebut menghasilkan beberapa ratus juta dolar setiap tahun untuk Myanmar. Terdapat dua perusahaan multinasional yang menguasai sektor gas di Myanmar, yakni *British Premier Oil* dan *French Total*. Ekspansi yang dilakukan oleh IHC Caland di Myanmar berkaitan dengan *British Premier Oil*. Hal tersebut dapat dilihat dari IHC Caland yang mengumumkan bahwa SBM Production Contractors Inc, salah satu anak perusahaan milik IHC Caland di Swiss, telah menandatangani kontrak selama 15 tahun dengan Premier Petroleum Myanmar Ltd, sebuah anak perusahaan dari *British Premier Oil*. Pengumuman kerjasama tersebut dinyatakan oleh IHC Caland pada tanggal 13 Juli 1998. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut terkait penyewaan *floating oil platform* yang digunakan dalam mengembangkan lapangan gas Yetagun, sekitar 215 kilometer dari pantai Myanmar. Akibat dari pengumuman yang disampaikan oleh IHC Caland terkait kerjasama tersebut, justru menimbulkan berbagai kritik dari pemerintah Belanda, organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia serta serikat-serikat buruh di Belanda (der Zwart & van Tulder, 2006). Kontrak IHC Caland di Myanmar telah dibuktikan dengan kemenangan kontrak selama lima belas tahun bernilai ratusan juta gulden untuk menyewakan sistem penyimpanan minyak yang mengapung kepada Premier Petroleum Myanmar Ltd. Kesepakatan bisnis tersebut ditandatangani ketika Myanmar mengalami kasus pelanggaran hak asasi manusia (Myanmarlibrary.org, 2019).

The Dutch Myanmar Coalition atau *Burma Centrum Nederland (BCN)* merupakan *non-governmental organization* (NGO) yang vokal menekan IHC Caland untuk membatalkan kontrak di Myanmar. BCN merupakan organisasi yang mana tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat Belanda terhadap perkembangan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Myanmar. BCN terdiri dari organisasi lingkungan hidup dan serikat buruh dalam melakukan protes terkait permasalahan yang menyangkut Myanmar dan Belanda (den Hond & de Bakker, 2012). BCN melakukan beberapa tindakan dalam upaya pembatalan kontrak bisnis IHC Caland di Myanmar dan menghasilkan keputusan bahwa IHC Caland untuk tidak melanjutkan kerjasama bisnis di Myanmar pada tahun 2004. Jadi, berdasarkan pada pendahuluan tersebut penulis akan lebih membahas mengenai dua strategi yang dilakukan oleh BCN dalam mempengaruhi pembatalan kontrak IHC Caland di Myanmar.

Leverage Politic dan Kohesivitas Jaringan yang Dibangun oleh Burma Centrum Nederland (BCN) Terkait Kontrak IHC Caland di Myanmar

Terdapat dua strategi yang dilakukan oleh *Burma Centrum Nederland (BCN)* dalam mempengaruhi IHC Caland guna mundur dari Myanmar. Kedua strategi tersebut antara lain

dengan dilakukannya *leverage politics* dan kohesivitas jaringan yang dibangun guna tercapainya tujuan BCN. Penggunaan dua strategi tersebut dapat diketahui dari teori *trans advocacy networks* (TANs) yang menargetkan perusahaan multinasional. Teori ini merupakan perkembangan dari Keck dan Sikkink (1998) di *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. TANs menurut Keck dan Sikkink adalah jaringan aktor-aktor internasional dalam sebuah isu yang berkaitan dengan norma dan nilai yang dianut bersama. Keunggulan TANs dalam menyelesaikan sebuah isu adalah terletak dari pertukaran informasi yang di dapat serta sumber dari informasi tersebut. Hal ini dikarenakan aktor-aktor yang terlibat tidak hanya berasal dari negara, melainkan lebih kepada *non-governmental organization* (NGO). Sehingga, informasi yang didapat lebih akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan melalui agen *grassroots* tersebut. Guna mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan pengembangan *corporate boomerang model* dalam upaya yang dilakukan oleh TANs terhadap keinginan yang ingin dicapai. *Corporate boomerang model* merupakan perkembangan dari TANs yang dikembangkan oleh Emily McAteer dan Simone Pulver (2009). Perkembangan dari TANs ini dikarenakan secara historis organisasi dan jaringan yang terlibat dalam advokasi perubahan sosial utamanya menargetkan tuntutan di negara asal. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, aktivis di lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, pembangunan dan keamanan telah melakukan perluasan cakupan target dengan memasukan target *non-domestic* seperti pemerintah asing dan organisasi internasional dan target *non-state actor*, seperti perusahaan multinasional.

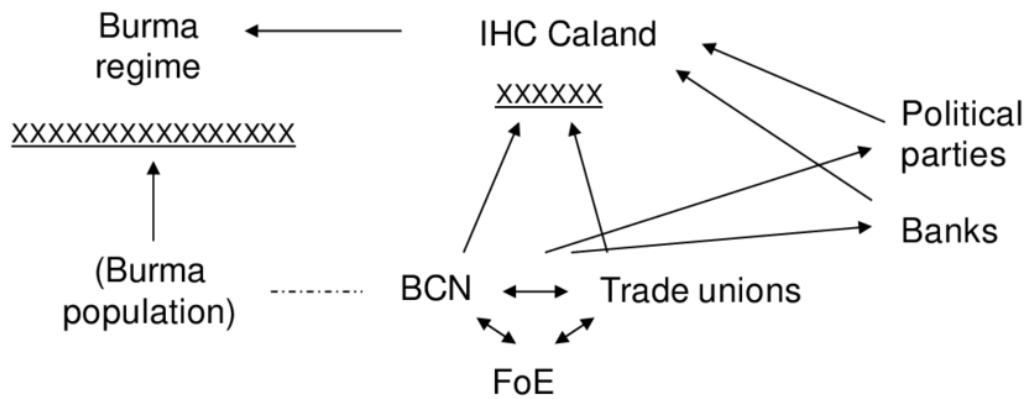
Strategi pertama yang dilakukan oleh BCN adalah *leverage politic* yang dilakukan adalah dengan memberikan tekanan dari negara yang memiliki *power* lebih kuat dibandingkan dengan negara yang dituju. Sehingga, tekanan yang diberikan dapat mendorong negara untuk membuat kebijakan yang diinginkan atau yang dituntut selama ini. Akan tetapi, dalam *corporate boomerang pattern*, aktor yang memiliki *power* terbesar dan dapat mendorong perusahaan untuk merubah keputusan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga, target yang dituju ketika dilakukannya *leverage politics* adalah rapat umum pemegang saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan untuk menekan manajemen perusahaan guna mencapai kepentingan dari pemilik saham dan tujuan perusahaan tersebut (McAteer & Pulver, 2009). BCN sebagai NGO yang vokal menentang kontrak bisnis tersebut melakukan *leverage politics* pula. BCN tidak sendirian dalam memperjuangkan tujuannya dalam usaha agar IHC Caland keluar dari Myanmar. BCN bersama FNV atau *The Dutch Trade Union Federation*. Ketika IHC Caland menyatakan akan menggunakan kode etik berdasarkan peraturan Belanda. Reaksi FNV terhadap tindakan IHC Caland tersebut adalah dengan mendekati lembaga-lembaga investor yang memiliki saham dengan kuantitas yang besar di IHC Caland, seperti *Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds* (ABP), ABN Amro dan ING guna menjual saham yang dimiliki oleh mereka.

Pada agustus 1998, IHC Caland melakukan diskusi dengan BCN, XminY, Novib, CNV dan FNV guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, diskusi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan dan mengakibatkan keputusan untuk membeli saham IHC Caland sendiri. Hal tersebut dilakukan guna dapat memberikan suara dalam RUPS. Tanggal 24 Agustus 1998, RUPS diselenggarakan dan kehadiran dari *press* lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Hal ini dikarenakan guna mengantisipasi atas aksi BCN. Ketika dilakukannya RUPS tersebut, BCN melakukan aksi protes dengan menampilkan tiga korban yang berdarah akibat dari kediktatoran Myanmar. Ketiga korban tersebut berbaring tepat didepan pintu masuk *head quarter* IHC Caland di Scheidam. Salah satu korban tersebut membawa foto peraih nobel, Au San Suu Kyi, yang mana juga sebagai pemimpin partai oposisi politik yang diculik oleh Junta. Pada pertemuan tersebut, BCN mampu mengangkat

isu yang terjadi di Myanmar. Bahkan ABP, salah satu pemegang saham terbesar IHC Caland, memberikan perintah untuk menyusun kode etik yang dapat diterima selama satu tahun dan dibahas pada RUPS berikutnya, pada tanggal 4 Juni 1999. Tindakan ABP tersebut karena sadar akan permasalahan sensitif yang menyangkut masalah politik (der Zwart & van Tulder, 2006). *Leverage politics* yang dilakukan tidak hanya berasal dari pemegang saham IHC Caland saja, melainkan juga berasal dari pemerintah Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tanggal 27 Maret 2002, yang mana FNV berhasil mengakibatkan IHC Caland dibawah tekanan. Hal tersebut dikarenakan adanya surat kepada 89 anggota parlemen dan *managing director* dari pelabuhan dan perusahaan pengerukan, dewan distrik, dewan kota dan perusahaan yang berkerjasama dengan IHC Caland meminta untuk melakukan pemberhentian kerjasama dengan IHC Caland. Dewan di IHC Caland pun mengumumkan bahwa tidak ada lagi menerima penugasan dari Myanmar selama situasi politik dan hak asasi manusia di Myanmar belum membaik. Keputusan tersebut diambil pada tanggal 8 April 2002 atas desakan dari Ybema, Sekretaris Negara urusan ekonomi. 16 September 2002, *The British Premier Oil* mengumumkan akan keluar dari Myanmar. Hal tersebut yang kemudian menjadikan kerjasama yang dilakukan IHC Caland dengan perusahaan tersebut menjadi tidak relevan kembali.

Strategi kedua yang dilakukan adalah kohesivitas jaringan yang dibangun BCN dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan apabila BCN akan berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Terdapat empat aktor yang terlibat dalam kohesivitas jaringan yang dibangun oleh BCN. Aktor pertama yang turut membantu BCN dalam upaya membatalkan kontrak bisnis IHC Caland di Myanmar adalah serikat buruh, yakni CNV dan FNV. CNV atau *The Christian Trade Union Federation* merupakan federasi serikat buruh Kristen di Belanda dengan dukungan basis anggota lebih dari 350.000 orang. Organisasi tersebut sepenuhnya organisasi independent dari kelompok pemerintahan dan politik. Selain itu, keanggotaan dalam organisasi tersebut bersifat terbuka untuk semua orang, tidak dilihat dari ras, agama atau latar belakang sosial. CNV merupakan salah satu organisasi serikat buruh terbesar di Belanda yang dibanggakan dan didukung oleh *grassroots* diseluruh negeri (cnv.nl, 2019). FNV atau *The Dutch Trade Union Federation* adalah serikat buruh terbesar yang ada di Belanda yang berdiri guna memperjuangkan kepentingan dalam hal pekerjaan dan pendapatan. FNV merupakan serikat buruh terbesar yang ada di Belanda (fnv.nl, 2019). Aktor kedua dalam kohesivitas jaringan yang dibangun oleh BCN berasal dari INGO, yakni *Friends of Earth International*. *Friends of Earth International* atau FoEI merupakan sebuah INGO yang terdiri dari gabungan berbagai NGO dan berfokus pada penyebab masalah lingkungan yang paling mendesak saat ini serta melakukan analisis di dalamnya (foei.org, 2019). Aktor ketiga adalah partai politik yang turut serta membantu BCN dalam mendorong IHC Caland membatalkan kontrak dan meninggalkan Myanmar. Partai politik yang terlibat adalah *the Dutch Labour Party* (PvdA), *the Dutch Socialist Party* (SP) dan *the Dutch Christian Democratic Party* (CDA). Aktor keempat adalah pemegang saham IHC Caland, utamanya tiga pemegang saham terbesar IHC Caland, yakni Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), ABN Amro dan ING.

Hubungan antar aktor dalam kohesivitas jaringan merupakan suatu hal yang harus ada. Terkait hubungan antar aktor dalam kohesivitas jaringan yang dibangun oleh BCN atas kontrak IHC Caland di Myanmar dapat dilihat melalui tabel dibawah :



Sumber : de Bakker & den Hond, 2011

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa BCN, bekerja sama dengan serikat buruh, FNV dan CNV, dan FoE. Kerjasama yang dilakukan oleh ketiganya berupa pertukaran informasi yang didapatkan. Sesuai dengan ciri organisasi *grassroots* lainnya, kekuatan utama yang dimiliki adalah data yang dimiliki serta kesesuaiannya di lapangan. Ketiganya melakukan kerjasama dalam mendorong IHC Caland agar keluar dari Myanmar melalui bantuan partai politik dan bank, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemegang saham. Secara tidak langsung bentuk dorongan yang diberikan kepada IHC Caland akan memberikan tekanan kepada rezim junta yang berkuasa di Myanmar. adanya perubahan terkait perubahan rezim yang berlaku tentunya akan memberikan dampak kepada masyarakat Myanmar.

BCN bersama dengan FNV, sebagai serikat buruh terbesar di Myanmar langsung melakukan aksi protes untuk mempersuasi IHC Caland, sebagai *head quarter* agar menarik diri keluar dari Myanmar. Keinginan BCN agar IHC Caland membatalkan kontrak dan keluar dari Myanmar bukannya tanpa alasan yang jelas. BCN menganggap bahwa melalui investasi yang dilakukan oleh IHC Caland tersebut, maka IHC Caland turut serta memiliki tanggung jawab atas militer junta tetap berkuasa di Myanmar. Kerjasama bisnis yang dilakukan oleh IHC Caland di Myanmar menjadi kontroversi, karena ketika memasuki awal tahun 1990-an, terjadi sebuah aksi boikot yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Thailand dan Kanada. Aksi tersebut melibatkan pemegang saham, universitas dan komunitas aktivis terhadap kegiatan investasi asing di Myanmar (Zarni, 2000). Pada tahun 1997, *The Dutch Labour Party* (PvdA), *the Dutch Socialist Party* (SP), *the European Parliament Green Party* dan serikat buruh besar di Belanda, CNV & FNV, menandatangani kepada komunitas bisnis untuk keluar dari Myanmar. Jadi, keributan yang ditimbulkan akibat kontrak bisnis di Myanmar tersebut dapat dimaklumi oleh IHC Caland. Akan tetapi, meskipun IHC Caland telah menyiapkan diri bahwa akan terjadi keributan, aksi protes yang terjadi justru lebih keras dan lebih lama dibandingkan dengan ketika Heinaken pertama kali hadir di Myanmar. Hal tersebut dikarenakan, IHC Caland tidak terpengaruh dengan aksi boikot konsumen yang dilakukan. Konsumen IHC Caland, umumnya juga berupa perusahaan dan tidak memiliki interaksi secara langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, IHC Caland tidak begitu merasakan dampak dari aksi boikot konsumen (Vergouw & den Hond, 2000).

Selain itu, muncul kelompok *Friends of Earth* (FoE) Belanda yang menaruh perhatian atas pembangunan pipa 60 km sepanjang jalur blok gas Yetagun. FoE berpendapat bahwa pembangunan pipa tersebut akan membawakan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati, pengusiran pemukiman warga atau desa yang berada di jalur tersebut serta adanya penggunaan tenaga kerja paksa. Tanggapan atas tuduhan FoE tersebut, CEO IHC Caland

berulang kali mengatakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh IHC Caland ialah di lepas pantai. Namun, dalam kenyataannya, adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika pembangunan pipa tersebut dilakukan. Hal tersebut ditemukan oleh BCN ketika melakukan investigasi sendiri dibantu oleh beberapa masyarakat Myanmar yang juga merupakan aktivis. Ketika “membersihkan” jalur pipa sepanjang 60 km tersebut, dibantu dengan militer masyarakat yang tinggal di daerah itu harus kehilangan tempat tinggalnya. Mirisnya, hal tersebut dilakukan secara paksa dan menggunakan kekerasan (Het Financieele Dagblad, 1998b). Akhir dari strategi yang dilakukan oleh BCN terkait kontrak IHC Caland di Myanmar adalah dengan merubah regulasi yang ada sesuai dengan aturan dari AOECD.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa IHC Caland melakukan kontrak bisnis di Myanmar ketika negara tersebut sedang mengalami krisis hak asasi manusia serta kondisi negara yang kurang memungkinkan untuk menerima investasi asing. BCN sebagai kelompok yang vokal terhadap permasalahan tersebut melakukan dua strategi utama yakni *leverage politics* dan kohesivitas jaringan yang dibangun. *Leverage politic* adalah melakukan penekanan atas pihak yang memiliki *power* lebih rendah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki *power* lebih tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan pendekatan BCN bersama dengan kohesivitas jaringannya melakukan penekanan terhadap IHC Caland melalui pemegang-pemegang sahamnya. Segala upaya yang dilakukan oleh BCN beserta dengan kohesivitas jaringannya membuahkan hasil dengan dibuktikan tercapainya kesepakatan antara IHC Caland dengan CNV dan FNV, yakni melalui penerapan aturan bisnis dari AOECD.

Daftar Pustaka

ARTIKEL DARING

BUKU DAN ARTIKEL DALAM BUKU

- De Bakker, Frank G.A. & Den Hond, Frank. 2011. "Case Description : A Disputed Contract-IHC Caland in Burma", dalam *European Business Ethics Cases in Contexts*
- Der Zwart, Alex van & Van Tulder, Rob. 2006. "Casestudy : Dredging in Burma", dalam *International business-society management : linking corporate responsibility and globalization*. Routledge.
- Holliday, Ian. 2005. "Doing Business with Rights Violating Refines Corporate Social Responsibility and Myanmar's Military Junta", dalam *Journal Business Ethics*
- Keck, Margareth E. & Sikkink, Kathryn. 1998. "Activist Beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics". London : Cornell University Press
- McAteer, E., & Pulver, S. 2009. "The Corporate Boomerang : Shareholder Transnational Advocacy Networks Targeting Oil Companies in the Ecuadorian Amazon". *Global Environmental Politics*, 9(1), [pp. 1-30]
- Salusu, J. 2006. "Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit". Jakarta : Grasindo.

DOKUMEN DAN SITUS WEB RESMI

- Burmalibrary.org. 2019. "IHC, A New Company in Burma"[online]. Tersedia dalam http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199808/msg011_32.html (Diakses pada tanggal 17 Juli 2019)
- Cnv.nl. 2019. "About The National Federation of Christian Trade Unions in the Netherlands" [online]. Tersedia dalam <https://www.cnv.nl/english/> (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019)
- Fnv.nl. 2019. "About Mondiaal FNV" [online]. Tersedia dalam <https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/over-mondiaal-fnv> (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019)
- Royalihc.com. 2019. "Royal IHC : The Technology Innovator Since The 17th Century" [online]. Tersedia dalam <https://www.royalihc.com/en/about-us/about-royal-ihc/history> (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019)
- Het Financieele Dagblad. 1998b. "IHC Caland snapt niets van dreiging met boycott." *Het Financieele Dagblad*, 15 July.

JURNAL ILMIAH

- Sen, B.K. & Gutter, Petter. 2001. "The Burmese Junta's Abuse of Investment Laws" [pdf]
- Steinberg, David I. 2005. "Burma/Myanmar : The Role of The Military in The Economy", [pdf]
- White, Judith A. 2004. "Globalisation, Divestment and Human Rights in Burma". [pdf]